

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim, peran organisasi non-pemerintah internasional (*International Non-Governmental Organizations/INGO*) menjadi semakin penting dalam mendorong tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan (Dorfler & Heinzl, 2023). Salah satu aktor yang menonjol dalam lanskap ini adalah Greenpeace International, sebuah jaringan advokasi transnasional yang sejak berdiri pada 1971 telah beroperasi di lebih dari 55 negara (Greenpeace, 2022). Greenpeace dikenal luas melalui kampanye globalnya yang menentang deforestasi, polusi laut, energi fosil, serta eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dengan mengandalkan pendekatan non-kekerasan, mobilisasi publik, dan tekanan politik terhadap negara maupun korporasi (Greenpeace International, 2023). Dalam konteks ini, Greenpeace tidak hanya berfungsi sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai simbol gerakan lingkungan lintas batas yang menentang praktik ekonomi eksploitatif.

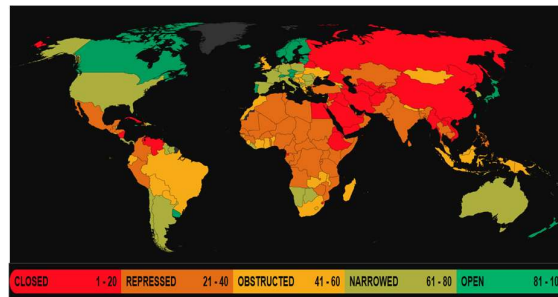
Salah satu isu strategis yang menjadi fokus utama advokasi Greenpeace adalah kawasan Arktik. Kawasan ini memiliki signifikansi global yang tinggi, baik secara ekologis, ekonomi, maupun geopolitik. Secara ekologis, Arktik berfungsi sebagai *climate regulator* yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global

melalui refleksi radiasi matahari (*albedo effect*) dan penyimpanan karbon dalam lapisan es serta *permafrost*. Pencairan es Arktik yang semakin cepat akibat perubahan iklim tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan komunitas lokal, tetapi juga berpotensi mempercepat pemanasan global melalui pelepasan gas metana dalam jumlah besar (IPCC, 2021).

Di sisi lain, mencairnya es justru membuka peluang ekonomi baru, terutama dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, serta pembukaan jalur pelayaran baru seperti *Northern Sea Route*. Hal ini menjadikan Arktik sebagai arena kompetisi geopolitik baru antara negara-negara besar, termasuk Rusia, yang memiliki garis pantai Arktik terpanjang dan kepentingan strategis besar dalam pengembangan energi di kawasan tersebut (Wilson Rowe, 2020). Dengan demikian, isu Arktik tidak hanya merupakan isu lingkungan, tetapi juga terkait erat dengan keamanan energi, kepentingan ekonomi, dan dinamika kekuasaan global. Inilah yang menjadikan advokasi perlindungan Arktik sangat krusial sekaligus kompleks.

Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, ruang gerak organisasi masyarakat sipil, termasuk INGO lingkungan mengalami penyempitan yang signifikan, terutama di negara-negara dengan sistem politik yang tersentralisasi. Laporan Civicus (2024) menunjukkan adanya tren peningkatan pembatasan terhadap aktivitas organisasi transnasional di negara-negara seperti Rusia, China, serta beberapa kawasan di Asia Tengah dan Afrika. Organisasi lingkungan kerap dipersepsikan sebagai

ancaman terhadap kepentingan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian negara-negara tersebut.



Gambar 1.1 Persebaran Negara yang meningkatkan pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat sipil, termasuk terhadap organisasi lingkungan per 2024.
Sumber : (Civicus, 2024)

Rusia menjadi salah satu contoh paling menonjol dari dinamika ini. Pada Mei 2023, pemerintah Rusia secara resmi melarang Greenpeace Rusia dengan alasan mengancam keamanan nasional dan mencampuri urusan domestik (Ministry of Justice of the Russian Federation, 2023). Kebijakan ini didasarkan pada regulasi “agen asing” (UU No. 121-FZ Tahun 2012) dan “organisasi yang tidak diinginkan” (UU No. 272-FZ Tahun 2015), yang memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk membatasi bahkan menutup organisasi asing. Pelarangan ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan sentralisasi kekuasaan di Rusia sejak awal 2000-an, yang semakin menguat pasca invasi ke Ukraina pada 2022, di mana logika keamanan negara menjadi dominan dan ruang sipil semakin dibatasi (Stoner-Weiss, 2006; McFaul, 2021; Tysiachniouk et al., 2024; Human Rights Watch, 2023).

Sebelum pelarangan, Greenpeace Rusia memainkan peran strategis dalam advokasi lingkungan domestik, termasuk kampanye penolakan eksplorasi minyak di Arktik, perlindungan hutan boreal, serta kritik terhadap proyek energi nuklir. Aktivitas ini seringkali berbenturan dengan kepentingan Rusia sebagai negara eksportir energi fosil dan kekuatan besar di kawasan Arktik (Wilson Rowe, 2020). Oleh karena itu, pelarangan Greenpeace tidak hanya mencerminkan tindakan administratif, tetapi juga merupakan bentuk sekuritisasi isu lingkungan yang dipandang mengancam stabilitas ekonomi dan legitimasi negara.

Pasca pelarangan, Greenpeace International menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan jaringan advokasinya. Hilangnya Greenpeace Rusia sebagai simpul penting dalam jaringan global menciptakan kekosongan strategis, khususnya di kawasan Eurasia. Dalam kondisi tersebut, ruang digital kemudian bertransformasi menjadi arena utama advokasi. Melalui media sosial, kampanye daring, dan jaringan komunikasi global, Greenpeace berupaya mempertahankan visibilitas isu Arktik, membangun solidaritas lintas negara, serta mengoordinasikan tekanan internasional terhadap eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut.

Penggunaan strategi digital bukanlah hal baru bagi Greenpeace. Sejak kampanye *Save the Arctic* pada 2012, organisasi ini telah memanfaatkan berbagai instrumen digital secara intensif (She, 2023). Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini berupaya memahami

bagaimana strategi advokasi digital Greenpeace Internasional dijalankan dalam isu Arktik Rusia pasca penghentian operasional Greenpeace Rusia pada tahun 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu:

“Bagaimana strategi advokasi digital Greenpeace Internasional dijalankan dalam isu Arktik Rusia pasca penghentian operasional Greenpeace Rusia pada tahun 2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi Greenpeace Internasional dalam isu perlindungan lingkungan, terutama dalam advokasi kawasan Arktik di Rusia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi digital yang dijalankan oleh Greenpeace Internasional dalam isu perlindungan lingkungan, terutama dalam advokasi kawasan Arktik di Rusia pasca penghentian operasional Greenpeace Rusia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam ranah studi gerakan sosial transnasional (*transnational advocacy networks*), keamanan non-tradisional, dan *global civil society studies*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategis bagi organisasi masyarakat sipil internasional, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dalam menyusun strategi advokasi di tengah pembatasan ruang gerak politik oleh negara. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Greenpeace International dan jaringan advokasi serupa dalam mengembangkan pendekatan advokasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di kawasan dengan risiko represi tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas internasional mengenai pentingnya melindungi ruang gerak masyarakat sipil sebagai bagian dari tata kelola global yang inklusif.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN) memberikan landasan konseptual penting untuk memahami bagaimana aktor advokasi non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil internasional, dapat beroperasi melintasi batas negara, memobilisasi dukungan publik, dan mempengaruhi kebijakan lintas skala (Keck & Sikkink, 1998). Dalam konteks advokasi lingkungan, TAN memungkinkan organisasi seperti Greenpeace untuk menghubungkan tekanan global dengan aksi lokal, sehingga tetap mampu mempertahankan norma lingkungan bahkan ketika ruang politik domestik mengalami pembatasan.

Salah satu studi yang secara spesifik menyoroti peran media digital dalam memperkuat jaringan advokasi ini adalah penelitian She (2023) berjudul "*Social media dissemination of counter accounts and stakeholder support – evidence from Greenpeace's "Save the Arctic" campaign on Facebook*". Penelitian ini menganalisis bagaimana Greenpeace memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, untuk menyebarkan counter accounts atau narasi tandingan terhadap praktik korporasi yang merusak lingkungan di kawasan Arktik. Temuan utama menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk

membangun legitimasi, memobilisasi dukungan pemangku kepentingan, serta menciptakan tekanan reputasional terhadap perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi Arktik (She, 2023). Lebih jauh, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan kampanye digital sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengemas pesan secara persuasif, memanfaatkan visualisasi, serta mengaktifkan partisipasi publik secara interaktif. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bagaimana dimensi digital telah menjadi bagian integral dari strategi advokasi Greenpeace bahkan sebelum terjadinya pelarangan di Rusia, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi menuju advokasi berbasis jaringan digital yang lebih intensif.

Dalam konteks yang lebih struktural, penelitian Villo, Halme, & Ritvala (2020) berjudul “*Theorizing MNE–NGO Conflicts in State-Capitalist Contexts: Insights from the Greenpeace, Gazprom and the Russian State Dispute in the Arctic*” menyoroti konflik antara Greenpeace, Gazprom, dan pemerintah Rusia dalam isu eksplorasi minyak di Arktik. Temuannya menunjukkan bahwa negara dengan model *state capitalism* cenderung memandang NGO internasional sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi strategis, sehingga merespons dengan pembatasan hukum dan tekanan politik yang sistematis (Villo et al., 2020). Studi ini penting untuk memahami konteks

represi yang kemudian berujung pada pelarangan Greenpeace Rusia.

Sejalan dengan itu, penelitian Lonkila, Shpakovskaya, & Torchinsky (2021) dalam “*Digital Activism in Russia: The Evolution and Forms of Online Participation in an Authoritarian State*” menjelaskan bahwa ruang digital menjadi alternatif utama bagi aktivisme di bawah rezim otoriter. Mereka menemukan bahwa pembatasan ruang sipil mendorong organisasi masyarakat sipil beradaptasi melalui kampanye media sosial, *hashtag activism*, dan simbol visual, meskipun tetap dibatasi oleh pengawasan negara (Lonkila et al., 2021). Temuan ini relevan untuk memahami pergeseran Greenpeace menuju strategi digital pasca pelarangan.

Dari sisi konseptual, Schmitz, Hall, & Dedmon (2019) mengembangkan tipologi strategi advokasi digital, yaitu *proselytizing, testing, conversing*, dan *facilitating*, yang kemudian diperdalam oleh Nina Hall (2022) dalam kerangka Digital TAN. Kerangka ini menjelaskan bagaimana NGO memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kekuatan jaringan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tekanan negara.

Dalam konteks Greenpeace, studi Sugiarto & Prasodjo (2024) menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif melalui jaringan digital dan komunitas muda efektif dalam memperluas jangkauan advokasi lingkungan. Sementara itu, Wicaksono (2023)

menemukan bahwa struktur jaringan Greenpeace bersifat hybrid, menggabungkan advokasi global dengan konteks lokal serta memanfaatkan mobilisasi digital untuk meningkatkan partisipasi publik. Namun, kedua studi ini masih berada dalam konteks negara dengan ruang sipil yang relatif lebih terbuka.

Berbeda dengan itu, penelitian Henry (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks Rusia, aktivisme lingkungan mengalami transformasi menuju strategi yang lebih terselubung dan teknokratis untuk menghindari represi negara. Aktivis cenderung menghindari framing politis dan lebih menekankan pendekatan ilmiah guna mempertahankan legitimasi (Henry, 2024).

Selain itu, penelitian terkini oleh Luong & Vu (2025) tentang aktivisme lingkungan di media sosial di tengah represi digital menunjukkan bahwa meskipun platform digital menyediakan ruang alternatif, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kontrol negara terhadap infrastruktur informasi. Sementara itu, Zavyalova (2025) dalam studinya tentang mekanisme stigmatisasi organisasi masyarakat sipil di Rusia menjelaskan bagaimana undang-undang “agen asing” dan “organisasi yang tidak diinginkan” berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat delegitimasi publik yang memperkuat represi. Kedua studi ini memperkaya kerangka analisis tentang keterbatasan Digital TAN ketika berhadapan

dengan negara yang memiliki kapasitas represif dan kontrol informasi yang tinggi.

Secara keseluruhan, literatur yang ada telah membahas dinamika TAN, peran media digital dalam advokasi, serta dampak represi negara terhadap organisasi masyarakat sipil. Namun, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik menjelaskan bagaimana Greenpeace International mentransformasikan strategi advokasinya setelah cabang nasionalnya di Rusia dinyatakan sebagai *undesirable organization*. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan kerangka Digital TAN dari Nina Hall (2022) untuk menganalisis bagaimana Greenpeace mengadaptasi strategi *proselytizing*, *testing*, *conversing*, dan *facilitating* dalam mempertahankan advokasi isu Arktik Rusia di tengah pembatasan negara.

1.5.2. Transnational Advocacy Network

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) pertama kali dikembangkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998) dalam karya klasik mereka *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. TAN merujuk pada jejaring lintas batas negara yang terdiri dari aktor-aktor non-negara seperti LSM, individu, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan media, yang bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai

tertentu, memperjuangkan norma internasional, serta menekan aktor negara maupun korporasi untuk melakukan perubahan kebijakan. Dalam perspektif Keck dan Sikkink (1998), kekuatan utama jaringan ini terletak pada kemampuan mereka untuk memobilisasi informasi, membangun solidaritas lintas batas, dan melakukan *boomerang pattern* yaitu strategi di mana aktor domestik yang terblokir oleh pemerintah mereka sendiri mengalirkan isu ke tingkat internasional untuk mendapatkan tekanan balik terhadap negara asal.

Pada perkembangannya, teori TAN tidak lagi hanya dipahami dalam konteks relasi fisik antar negara, melainkan juga dalam konteks digital yang semakin menentukan lanskap advokasi global. Transformasi ini dijelaskan secara mendalam oleh Nina Hall (2022) dalam karyanya "*Transnational Advocacy in the Digital Era: Think Global, Act Local*". Hall berpendapat bahwa teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara jaringan advokasi bekerja, terutama dalam hal mobilisasi sumber daya, komunikasi lintas batas, dan konstruksi wacana publik. Jika pada era awal TAN kekuatan utama terletak pada pertukaran informasi dan akses terhadap elite politik, maka di era digital kekuatan tersebut bergeser pada kemampuan organisasi untuk berinteraksi langsung dengan publik global melalui media sosial, platform digital, dan kampanye daring (Hall, 2022).

Menurut Hall (2022), digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan advokasi, tetapi juga mendisrupsi struktur hierarkis tradisional dalam jaringan transnasional. Dalam konteks ini, organisasi besar seperti Greenpeace, Amnesty International, dan Avaaz tidak lagi hanya bertindak sebagai pusat kontrol informasi, melainkan juga sebagai fasilitator interaksi horizontal yang memungkinkan partisipasi publik lebih luas (Hall, 2019). Hall memperkenalkan tipologi empat model strategi digital yang digunakan NGO dalam memanfaatkan ruang daring, yaitu *proselytizing*, *testing*, *conversing*, dan *facilitating*.

Pertama, model *proselytizing* menekankan pada penyiaran satu arah (*one-way broadcasting*) dari pesan kampanye kepada audiens global. Dalam strategi ini, organisasi memanfaatkan platform digital seperti Twitter, Instagram, atau YouTube untuk menyebarkan narasi moral, meningkatkan kesadaran publik, serta membangun citra sebagai otoritas isu (Hall, 2022). Strategi ini penting untuk menciptakan resonansi simbolik di tingkat global, meskipun seringkali kurang membuka ruang partisipasi publik secara langsung.

Kedua, model *testing* menekankan penggunaan analitik digital dan eksperimen data untuk mengukur respons publik terhadap kampanye tertentu. Dengan memanfaatkan algoritma dan data insight, NGO dapat menguji pesan mana yang paling efektif,

menentukan waktu unggah terbaik, dan menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih berdampak (Hall, 2022). Model ini menunjukkan pergeseran dari aktivisme berbasis intuisi menuju aktivisme berbasis data.

Ketiga, model *conversing* merepresentasikan pendekatan komunikasi dua arah antara NGO dan masyarakat. Dalam model ini, organisasi tidak lagi hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan, berdialog, dan membangun hubungan timbal balik dengan pengikutnya. Melalui strategi ini, jaringan advokasi menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap isu yang diangkat, sekaligus memperkuat legitimasi moral dan sosialnya (Hall, 2022).

Keempat, model *facilitating* memposisikan NGO sebagai katalisator yang menggerakkan pendukungnya untuk bertindak sebagai aktor utama kampanye. Hall (2022) menyebut bahwa strategi ini menandai fase paling demokratis dari evolusi TAN, di mana partisipan tidak sekadar penerima pesan, melainkan turut berperan dalam mendesain, menyebarkan, dan melaksanakan aksi kolektif. Dalam konteks ini, kekuasaan advokasi menjadi lebih tersebar, dan peran organisasi berubah dari pengendali informasi menjadi penggerak komunitas global.

Dengan demikian, teori TAN di era digital yang diperkenalkan oleh Nina Hall memperluas kerangka klasik Keck dan Sikkink ke dalam ranah teknologi dan media baru. Hall

menegaskan bahwa kekuatan jaringan advokasi kini tidak hanya terletak pada kemampuan mereka menembus batas negara, tetapi juga pada kapasitasnya untuk menembus batas algoritmik dan membangun solidaritas lintas platform. Dalam penelitian ini, kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN) versi digital digunakan untuk menganalisis praktik advokasi Greenpeace International yang dapat diamati melalui dokumen strategis dan aktivitas advokasi digital pasca pelarangan Greenpeace Rusia.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Proselytizing

Model *proselytizing* merupakan bentuk strategi digital yang berorientasi pada penyebaran pesan satu arah (*one-way broadcasting*). Dalam model ini, organisasi memanfaatkan media sosial, situs web, serta platform digital lainnya untuk menyebarkan nilai, norma, atau pesan kampanye kepada khalayak luas tanpa mengharapkan interaksi langsung (Hall, 2022). Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran publik (*awareness raising*) dan memperkuat legitimasi moral organisasi di ranah global.

1.6.1.2. Testing

Model *testing* menekankan pada penggunaan data dan analitik digital untuk menguji efektivitas pesan

kampanye. Melalui pemanfaatan engagement metrics, algoritma media sosial, atau uji A/B pada konten daring, organisasi dapat menilai sejauh mana pesan mereka diterima dan direspons oleh publik (Hall, 2019). Model ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan advokasi yang berbasis intuisi menuju strategi yang berbasis bukti dan data (*data-driven advocacy*).

1.6.1.3. Conversing

Model *conversing* mengacu pada bentuk komunikasi dua arah (*two-way communication*) antara organisasi dengan publik. Hall (2022) menekankan bahwa model ini menjadi salah satu pilar utama dalam membangun hubungan partisipatif yang bersifat dialogis antara NGO dan komunitas daringnya. Dalam model ini, organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menanggapi opini publik, berdiskusi, dan membangun keterlibatan emosional melalui ruang digital.

1.6.1.4. Facilitating

Model *facilitating* merepresentasikan fase paling partisipatif dalam strategi digital TAN. Dalam model ini, organisasi berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan para pendukung menjadi penggerak utama aksi kampanye (*supporter-led mobilization*). Hall (2019) menegaskan

bahwa strategi ini mendesentralisasi kekuasaan advokasi, menjadikan komunitas daring sebagai aktor utama dalam mendesain, menyebarkan, dan melaksanakan kegiatan kampanye.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Proselytizing

Proselytizing secara operasional didefinisikan sebagai upaya Greenpeace untuk memperluas dukungan publik dan memperkuat legitimasi moral melalui kampanye digital lintas negara, indikatornya meliputi publikasi narasi lingkungan di media sosial, penyebaran petisi daring, serta kolaborasi dengan media independen.

1.6.2.2. Testing

Konsep *testing* dioperasionalkan sebagai proses adaptasi Greenpeace terhadap tantangan kebijakan dan pembatasan hukum yang diberlakukan Rusia, dengan menguji efektivitas berbagai strategi komunikasi digital dan mobilisasi jaringan internasional. Indikatornya meliputi perubahan gaya kampanye, pengujian respons publik terhadap pesan, serta analisis efektivitas taktik daring pasca pelarangan.

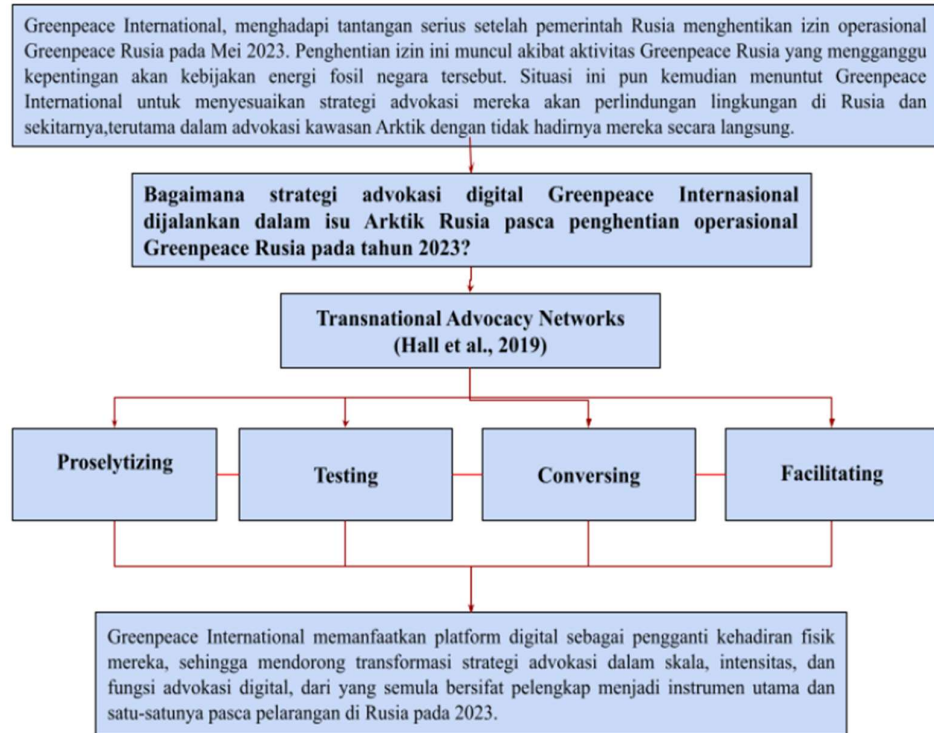
1.6.2.3. Conversing

Secara operasional, *conversing* didefinisikan sebagai aktivitas komunikasi dua arah antara Greenpeace dan masyarakat global melalui media digital untuk membangun rasa solidaritas dan kepercayaan. Indikatornya mencakup intensitas interaksi daring, tingkat partisipasi masyarakat, dan munculnya dukungan berbasis komunitas global.

1.6.2.4. Facilitating

Facilitating dioperasionalkan sebagai peran Greenpeace dalam memfasilitasi kerjasama antar aktor lintas negara melalui ekosistem digital, termasuk jaringan NGO, jurnalis independen, akademisi, dan figur publik. Indikatornya meliputi pembuatan platform kolaboratif, koordinasi lintas jaringan dalam kampanye transnasional, serta dukungan terhadap riset independen.

1.6.3. Alur Kerangka Berpikir



1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa pelarangan Greenpeace Rusia pada 2023 tidak melahirkan strategi digital yang sepenuhnya baru, melainkan mengubah fungsi, intensitas, dan skala dari strategi digital yang telah ada sebelumnya. Sebelum 2023, strategi digital berperan sebagai pelengkap aksi fisik dan kehadiran organisasi di lapangan. Pasca pelarangan, strategi digital bertransformasi menjadi instrumen utama dan satu-satunya dalam menopang advokasi. Transformasi ini tercermin dalam pergeseran target audiens (dari publik domestik ke publik global) serta penguatan koordinasi jaringan advokasi transnasional.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian makna, pola, dan proses di balik peristiwa tertentu (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai bagaimana Greenpeace International mentransformasikan strategi advokasinya pasca pelarangan di Rusia. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” Greenpeace International beradaptasi dan melakukan strategi advokasi digital pasca cabang mereka (Greenpeace Rusia) dinyatakan sebagai organisasi tidak diinginkan (*undesirable organization*) oleh pemerintah Rusia.

Dalam membantu menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen dan konten digital sebagai metode utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji pola advokasi Greenpeace International melalui publikasi resmi, kampanye digital, dan aktivitas media daring yang merepresentasikan praktik advokasi organisasi di tingkat transnasional (Bowen, 2009; Hall, 2019).

1.8.2. Situs Penelitian

Menurut Nasution (2003), situs penelitian adalah lokasi atau tempat di mana terdapat subjek, kegiatan, dan fenomena yang dapat diteliti secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan situs penelitian secara *desk research* di kota Semarang, Surabaya, dan Jakarta Indonesia dengan mengumpulkan data dan variabel terikat melalui media elektronik dan non elektronik.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah Greenpeace International sebagai aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional (TAN) yang beroperasi di ranah digital.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, berupa kata-kata, narasi, dokumen, maupun visual yang memiliki makna dan informasi relevan terhadap topik penelitian (Nasution, 2003). Data diperoleh dari publikasi resmi Greenpeace International, laporan tahunan, *press release*, dokumen kampanye, peraturan pemerintah Rusia terkait organisasi asing, laporan NGO internasional, artikel ilmiah, serta konten digital seperti unggahan media sosial Greenpeace.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga mencakup dokumen resmi pemerintah Rusia terkait penetapan *undesirable organization*, pernyataan pejabat negara, laporan media internasional dan Rusia (termasuk TASS, RIA Novosti, Novaya Gazeta Europe), data ekonomi energi dari lembaga seperti Global Witness, Reuters, dan Interfax, serta putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) yang relevan. Penggunaan sumber dari luar Greenpeace dimaksudkan untuk menguji klaim efektivitas advokasi secara lebih objektif.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan *literatur review* penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku, situs Greenpeace dan media sosial Greenpeace serta pemberitaan media internasional seperti BBC, Reuters, atau The Guardian yang membahas pelarangan Greenpeace.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola makna (tema) dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2012). Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Pengumpulan dan pembacaan awal terhadap dokumen strategis dan konten digital Greenpeace International;

2. Reduksi data untuk memilah informasi relevan sesuai fokus teori TAN digital;
3. Pengkodean terbuka berdasarkan empat model strategi digital (*proselytizing, testing, conversing, dan facilitating*);
4. Penyusunan tema utama untuk menemukan makna dan implikasi strategi advokasi Greenpeace pasca pelarangan;
5. Verifikasi dan interpretasi hasil melalui triangulasi data.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dalam penelitian kualitatif mencakup aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Nasution, 2003). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini melakukan triangulasi sumber dokumen dan sumber digital, serta menggunakan sumber dari berbagai pihak (Greenpeace, pemerintah Rusia, media independen) untuk meminimalkan bias.